

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Amruddin, Rikardo Silaban, Nurtania Sudarmi, Eksa Rusdiana, Nurdin Mappa, Ulidesi Siadari, dan Mochamad Sugiarto, 2021. *Ilmu Ternak dan Koperasi*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Andrinof. D. 2006. *Analisis Pola Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging pada Peternak Plasma*. PT. Satwa Mirama Raya di Kabupaten Malang.
- A'an Efendi dan Freddy Purnomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bagir Manan, 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, LPPM Universitas Bandung, Bandung.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Depok, Jawa Barat.
- Bambang Supriyadi, Ika Sartika, Gatingsih. 2012. *Ilmu Kewilayahan* Cetakan pertama. CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Bergas Prana Jaya. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Anak Hebat Indonesia. Yogyakarta.
- Carolyn Abbot, 2009. *Enforcing Pollution Control Regulation: Strengthening Sanctions and Improving Deterrence*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.

- Darda Syahrizal. 2013. *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Cetakan Ke-1. Medpress Digital. Yogyakarta.
- Dayanto dan Asma Karim. 2015. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi: Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*. Deepublish. Yogyakarta.
- Ermaya Suradinata, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ramadhan, Bandung.
- Hanif Nurcholis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Mas Bakar. 2010. *Peradilan Satu Atap dalam Rezim Hukum Administrasi Negara*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*, Cetakan. Ke-7, Kanisius, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Philipus M. Hadjon (dkk). 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gajah Madah University Press. Yogyakarta
- Philipus M. Hadjon. 1996. *Penegakan Hukum Indonesia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam Buku, *Butir-Butir*

- Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak.* B. Arief Sidarta (et.al), Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara.* Ghalia Indonesia. Jakarta.
- M. Riady, 2004. *Tantangan dan Peluang Peningkatan Produksi Sapi Potong Menuju Tahun 2020. Paper pada Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004.* Dirjen Bina Produksi Peternakan. Jakarta.
- Ridwan HR. 2014. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah.* FH UII Press. Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara.* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sahya Anggara, 2018. *Hukum Administrasi Negara.* Cetakan Ke-1. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- D.T.H. Sihombing. 1997. *Ilmu Ternak Babi.* Fakultas Peternakan IPB. Bogor.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Rajawali Pers. Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Gramedia Pustaka, Jakarta.

## **JURNAL, ARTIKEL ILMIAH, DAN SKRIPSI**

Alber Tulak, Khaerunnisa dan Landius, 2017.”*Strategi Pengembangan Peternakan Babi Di Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya*”, Jurnal Optima II, Program Studi Agrobisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Baliem Wamena, Papua.

Dinar Ayu Ananda, 2013. *Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Implementasi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tuga dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja)*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Hadi, P. & Ilham, N. 2002. *Problem dan prospek pengembangan usaha pembibitan sapi potong di Indonesia*. Jurnal Litbang Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Dep. Pertanian-Jakarta. Vol 21.

Haeruni Handayani, 2020, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Terhadap Pengawasan Aset Pemerintah Kota Makassar yang Belum Memiliki Sertifikat Hak Milik*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Hamzah Halim, Musakkir, dan Hanan Khasyrawi Abrar. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Eksklusif*. Journal of Islamic Economic Law Vol. 5, No. 1 Maret.

- Hardiana Hatta, “*Penegakan Hukum Perizinan terhadap Usaha Karaoke di Kota Makassar*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Haruo, N. 2000. *Regional Development in Third World Countries – Paradigms and Operational Principles*. (The International Development Journal Co. Ltd). Tokyo. Japan.
- Karianne Albers, 2005. *The Fundamental Duty to Enforce Judicial Law Making or A General Rechtsstaat Principle, Judicial Law Making and administrative law*. Antwerpen-Oxford: Intersentia.
- Mahmuzar. 2020. *Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.50 No. 2.
- Matheus Sariubang, 2018, “*Analisis Pendapatan Pemeliharaan Ternak Babi Di Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan*”, Jurnal Ilmiah AgroSaint, , Vol. 2, No. 2, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Toraja.
- Muh. Hasrul, 2017. *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum Amanna Gappa, VOI. 25 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Risman, 2016, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Peternakan Babi (Studi Kasus Di Dusun Nggerukopa)*”, Skripsi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Alauddin Makassar, Makassar.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suci Yeniar Nainggolan. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sektor Pertanian, Peternakan, Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Kota Binjai. (Skripsi). Ahli Madya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Medan.

Wahdah Zainal Imam. *Konsepsi Tanggung Gugat Pemerintah Daerah Industri Penerbangan*. Jurnal Amanna Gappa Vol.28 No. 1 Maret 2020. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Windy Valentine Ghansa, Michael Mantiri, dan Josef Kairupan, 2018. *Peran Pemerintah dalam Meminimalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, Vol. 1 No. 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Manado.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 423/Kpts/OT.210/7.2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Babi Yang Baik.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha Dibidang Peternakan dan Pengenaan Retribusi atas Pemeriksaan Kesehatan Hewan Serta Daging Dalam Wilayah Kota Makassar.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Wilayah Bebas Ternak di Kota Makassar

Keputusan Walikota Makassar Nomor: 524/790/Kep/XI/2010 tentang Penetapan Wilayah Bebas Ternak Dalam Kota Makassar

## **WEBSITE**

<https://makassar.tribunnews.com/2016/03/24/ternyata-ada-12-peternak-babi-di-kampung-katimbang-biringkanaya>

<https://news.detik.com/berita/d-4898245/limbah-kotoran-ganggu-warga-ribuan-ternak-babi-di-makassar-ditertibkan>

<https://www.simpulrakyat.co.id/2020/02/resahkan-warga-satpol-pp-tertibkan-peternakan-babi-di-makassar.html>

<https://regional.kompas.com/read/2020/02/12/18281191/cemari-lingkungan-peternakan-babi-di-makassar-diminta-segera-tutup>



# LAMPIRAN

## KUISIONER

### **KUISIONER PENELITIAN SKRIPSI!**

#### **Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penertiban Terhadap Usaha Peternakan Babi Di Wilayah Bebas Ternak dalam Kota Makassar**

Berikut ini adalah kuisisioner yang berkaitan dengan penelitian usaha peternakan babi di wilayah bebas ternak dalam Kota Makassar. oleh karena itu saya memohon ketersediaan dari anda untuk mengisi kuisisioner penelitian skripsi berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi anda, saya ucapkan banyak terimakasih.

#### **IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : MANAF FAISAL

Pekerjaan : PEDAGANG

Alamat : JL. HJ. KALLA

Usia : 39

Pendidikan Terakhir :

#### **Daftar Kuisisioner :**

Mohon untuk memberikan tanda centang pada setiap pernyataan yang anda pilih.

#### **Keterangan :**

Ya = Setuju

Tidak = Tidak Setuju

### DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Saya Mengetahui Bahwa Adanya Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Wilayah Bebas Ternak Di Kota Makassar	✓	
2.	Saya Merasa Tidak Terganggu Dengan Adanya Peternakan Babi Di Wilayah Tempat Tinggal Saya		✓
3.	Saya Mengetahui Bahwa Kelurahan Panaikang Sebagai Wilayah Yang Tidak Diperbolehkan Adanya Usaha Peternakan.	✓	
4.	Menurut Anda, Apakah Pelaksanaan Penertiban Usaha Peternakan Sudah Memberikan Efek Jera ?		✓
5.	Menurut Anda, Apakah Pengawasan Pemerintah Setempat Sudah Efektif Dalam Usaha Peternakan Ini ?		✓
6.	Saya Ikut Menentang Adanya Usaha Peternakan Tersebut	✓	
7.	Apakah Pelaksanaan Penertiban Terhadap Usaha Peternakan Terlaksana Dengan Baik		✓
8.	Menurut Saya, Pelaksanaan Penertiban Terlalu Berlarut-Larut		✓
9.	Menurut Saya, Selain Relokasi Wilayah Peternakan Juga Perlu Untuk Adanya Penahanan Ternak	✓	
10.	Menurut Saya, Perlu Adanya Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Bagi Pemilik Ternak	✓	

### **KUISIONER PENELITIAN SKRIPSI**

#### **Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penertiban Terhadap Usaha Peternakan Babi Di Wilayah Bebas Ternak dalam Kota Makassar**

Berikut ini adalah kuisisioner yang berkaitan dengan penelitian usaha peternakan babi di wilayah bebas ternak dalam Kota Makassar. oleh karena itu saya memohon ketersediaan dari anda untuk mengisi kuisisioner penelitian skripsi berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi anda, saya ucapkan banyak terimakasih.

#### **IDENTITAS RESPONDEN**

Nama : Jonni Limpo

Pekerjaan : buruh harian

Alamat : Jl. haji kaula

Usia : 58

Pendidikan Terakhir : SD

#### **Daftar Kuisisioner :**

Mohon untuk memberikan tanda centang pada setiap pernyataan yang anda pilih.

#### **Keterangan :**

Ya = Setuju

Tidak = Tidak Setuju



### DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Saya Mengetahui Bahwa Adanya Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Wilayah Bebas Ternak Di Kota Makassar	✓	
2.	Saya Merasa Tidak Terganggu Dengan Adanya Peternakan Babi Di Wilayah Tempat Tinggal Saya		✓
3.	Saya Mengetahui Bahwa Kelurahan Panaikang Sebagai Wilayah Yang Tidak Diperbolehkan Adanya Usaha Peternakan.	✓	
4.	Menurut Anda, Apakah Pelaksanaan Penertiban Usaha Peternakan Sudah Memberikan Efek Jera ?		✓
5.	Menurut Anda, Apakah Pengawasan Pemerintah Setempat Sudah Efektif Dalam Usaha Peternakan Ini ?		✓
6.	Saya Ikut Menentang Adanya Usaha Peternakan Tersebut		✓
7.	Apakah Pelaksanaan Penertiban Terhadap Usaha Peternakan Terlaksana Dengan Baik	✓	
8.	Menurut Saya, Pelaksanaan Penertiban Terlalu Berlarut-Larut		✓
9.	Menurut Saya, Selain Relokasi Wilayah Peternakan Juga Perlu Untuk Adanya Penahanan Ternak		✓
10.	Menurut Saya, Perlu Adanya Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Bagi Pemilik Ternak		✓



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 9136/UN4.5.3/PT.00/2021  
Lampiran : -  
Hal : **PENELITIAN**

Makassar, 10 November 2021

Kepada  
Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul Sel  
di,-  
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : NITA EVINIYAH  
No. Pokok : B12116008  
No. HP : 085399442911  
Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara  
Alamat : Makassar  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.  
2. Ariani Arifin ,SH.,MH

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TERHADAP USAHA PETERNAKAN BABI DI WILAYAH BEBAS TERNAK DALAM KOTA MAKASSAR

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Dr. Muh. Hasrul ,S.H.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19810418 200212 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;







PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 23341/S.01/PTSP/2021  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Walikota Makassar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 9136/UN4.5.3/PT.01.04/2020 tanggal 10 November 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NITA EVINIYAH**  
Nomor Pokok : B12116008  
Program Studi : Hukum Adm. Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TERHADAP USAHA PETERNAKAN BABI DI WILAYAH BEBAS TERNAK DALAM KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **30 November 2021 s/d 16 Januari 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**. Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 16 November 2021

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI., M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;  
2. *Peringgal*.

SIMAP PTSP 16-11-2021

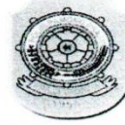


Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 3620217  
**MAKASSAR**



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 345 / 176.1 / PO-PP / XI / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MUHAMMAD IQBAL, SH  
N i p : 19780325 200901 1 007  
Pangkat/Golongan : Pembina ( IV/a)  
Jabatan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar  
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : NITA EVINIYAH  
Nim/ Jurusan : B12116008 / Hukum Adm. Negara  
Lembaga : Universitas Hasanuddin  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Benar telah melaksanakan penelitian pada instansi pemerintah kota makassar Unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Berkaitan penyusunan Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TERHADAP USAHA PETERNAKAN BABI DIWILAYAH BEBAS TERNAK DALAM KOTA MAKASSAR "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk digunakan seperlunya .

Makassar, 30 November 2021

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Makassar



**MUHAMMAD IQBAL, SH**

Pangkat : Pembina ( IV/a)

NIP : 19780325 200901 1 007





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN**

Jl. Urip Sumohardjo No. 8 (Gabungan Dinas) Makassar

Telp. +62411-854920 Fax +62411-854759

Email : dpp.mks@gmail.com website:dpp.makassar.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/33/0PP/E/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LAODE ZAMILUDDIN, SE, MM**  
NIP : 19740527 201001 1 011  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I / (III/d)  
J a b a t a n : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Menerangkan bahwa :

Nama : **NITA EVINIYAH**  
Nim/Jurusan : B12116008 / Hukum Adm. Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS  
Judul : **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TERHADAP USAHA PETERNAKAN BABI DI WILAYAH BEBAS TERNAK DALAM KOTA MAKASSAR)”**

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi pada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sesuai dengan judul diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12 Januari 2022

A.n. Kepala Dinas

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

  
**LAODE ZAMILUDDIN, SE, MM**  
Pangkat : Penata Tk. I  
Nip : 19740527 201001 1 011



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN PANAKKUKANG**

**Jl. Batua Raya 168, Telp 456054 Makassar  
Kode Wilayah : 73.71.09**

Makassar, 11 Januari 2022

Nomor : 070/03/KPNK/I/2022  
Lampiran :  
Perihal : Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fak.Hukum UNHAS

Di -  
Tempat

Menunjuk surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/2534-II/BKBP/XI/2021, Tanggal 23 November 2021, perihal tersebut di atas maka bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : NITA EVINIYAH  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNHAS  
Jurusan : Hukum Adm. Negara  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo. 36, Samata Gowa  
Judul : **"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TERHADAP USAHA  
PETERNAKAN BABI DI WILAYAH BEBAS TERNAK DALAM KOTA MAKASSAR"**

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan Surat Telah Melaksanakan Penelitian** ini.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Camat Panakkukang  
Kasi Pemberdayaan Masyarakat  
dan Kesejahteraan Sosial



**Dra. Ec. ST Asma Hamra**  
Pangkat : Penata TK I  
Nip.19651211 199103 2 007

## DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara bersama Bapak Abd Rahim selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota



2. Wawancara bersama Ibu Yuli selaku Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar





### 3. Wawancara bersama Ketua Rw. 03 Kelurahan Panaikang



### 4. Wawancara bersama Ketua Rt. 10 Kelurahan Panaikang

